

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Letak posisi Turki secara geo-politik dan geo-strategis sangat unik. Posisi dan kedudukan Turki berada pada pertemuan Eropa dan Asia disamping masuk dalam wilayah Balkan, Timur Tengah, pintu masuk kewilayah Kaukasia dan Mediterania. Posisi tersebut menempatkan Turki menjadi satu kesatuan yang multidimensi dan sebagai "*regional power*" serta memiliki peranan yang sangat berpengaruh di kawasan. Berakhirnya periode bipolarisasi dunia menyusul runtuhnya Uni Sovyet dan Pakta Warsawa, tidak berarti berkurangnya nilai potensi Turki sebagai "bumper" negara-negara Barat dalam mencegah ekspansi komunisme di kawasan. Pada dasarnya strategi kebijakan luar negeri Turki yang digariskan dalam setiap program kerja pemerintah tetap mengutamakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif selaras dengan prinsip dasar yang diletakkan bapak pendiri Republik Turki Mustafa Kemal Attaturk yaitu "*peace at home, peace in the world*" secara konsisten menjadi landasan utama dalam implementasi setiap kebijakan luar negeri Turki.¹

Sebagai satu-satunya negara sekuler yang menganut prinsip demokrasi dan sekutu negara-negara Barat di kawasan, Turki mengambil peranan yang cukup berpengaruh secara geo-politik dan geo-strategik. Turki tampak mampu memainkan peranannya secara optimal yang dimanfaatkan sebagai "*bargaining*

position" dalam megantisipasi setiap isu-isu regional. Hal itu tidak dapat diabaikan mengingat posisi Turki berbatasan langsung dengan negara-negara atau kawasan yang merupakan kancah kegawatan yang paling labil dewasa ini di antaranya kemelut di wilayah Balkan, konflik di Georgia, Nagorna-Karabakh, masalah Irak khususnya di wilayah utaranya dan tentu saja pergolakan di kawasan Timur Tengah.²

Sejak terbentuknya Republik Turki tahun 1923 yang diprakarsai oleh Mustafa Kemal Attaturk telah diletakkan dasar strategi orientasi dan politik luar negeri Turki adalah melihat ke negara-negara barat. Realisasi kebijakan tersebut, Turki selanjutnya bergabung kedalam aliansi-aliansi strategis yang dibentuk oleh pihak negara Barat diantaranya *North Atlantic Treaty Organisation / NATO* (dimensi militer/sejak 18 Februari 1952), *Organisation Economic Cooperation Depelovement / OECD* (dimensi ekonomi/sejak 16 April 1948), *Council of Europe* (dimensi politik/sejak tahun 1945), *Weastern European Union (associate member/sejak tahun 1992)* dan yang utama berupaya keras berintegrasi menjadi anggota Uni Eropa (UE/sejak tahun 1963).³ Usaha Turki untuk berintegrasi dengan Uni Eropa sampai tahun 1999 hanya baru sebagai *associate member*. Perjuangan Turki baru tercapai dalam tahapan harapan ketika KTT UE di Helsinki tahun 1999 secara formal memasukkan Turki kedalam kelompok kandidat potensial. Dalam proses selanjutnya Turki harus melakukan langkah-langkah progresif dan reformatif secara luas khususnya dibidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan struktural.

² *Ibid.*, hal. 8.

³ Lihat dalam: *Turkey 1989 Almanac – Chronology of 900 Years*.

Panjangnya proses integrasi Turki menuju keanggotaan penuh Uni Eropa dimana Uni Eropa kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menuntut upaya keras Turki untuk memenuhi berbagai prasyarat keanggotaan penuh UE menjadi hal yang menarik penulis untuk mengungkapkan dalam bentuk penulisan skripsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Upaya Turki Menuju Keanggotaan Penuh Uni Eropa Pasca Peningkatan Status Turki menjadi Kandidat Potensial Uni Eropa di KTT Helsinki Tahun 1999”**.

B. Tujuan Penulisan

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang metodologi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya dan khususnya pada langkah strategi suatu negara dalam mewujudkan Kepentingan Nasional yang diimplementasikan melalui Politik Luar Negeri negara tersebut.
2. Mempelajari strategi Turki sebagai satu-satunya negara sekuler yang mayoritas masyarakatnya Muslim untuk berintegrasi dalam masyarakat Uni Eropa yang Kristen.

C. Latar Belakang Masalah

Turki adalah salah satu negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di kawasan Eurasia dan memiliki peran besar dalam perkembangan politik kebudayaan di dunia Islam ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa. Setelah

berada jauh dibawah standar keanggotaan UE. *Ketiga*, keraguan akan letak geografis Turki apakah termasuk benua Eropa karena hanya 16% dari wilayah Turki yang masuk wilayah benua Eropa. *Persoalan keempat*, dalam konteks politik, Turki dianggap belum memenuhi standar keanggotaan UE. Bagi Uni Eropa, Turki adalah bagian dari konsep Timur Tengah dalam artian dominan Muslim, adanya kecenderungan rakyat pada politik Islam, pelanggaran hak asasi dan tertinggal secara ekonomi. Para pemimpin Partai Kristen Demokrasi di Eropa menganggap Turki yang Muslim tidak cocok untuk menjadi anggota Uni Eropa yang Kristen. Ada kekhawatiran bagi warga Eropa bahwa Islam tidak bisa kompatibel dengan demokrasi liberal yang menjadi identitas Eropa. Namun tentu saja kekhawatiran ini tidak dinyatakan secara terbuka oleh para pemimpin Eropa yang gemar melakukan retorika tentang persamaan hak dan toleransi beragama itu. Alasan penolakan keanggotaan Turki pada tahun 1989 lebih dititik beratkan pada buruknya catatan demokratis dan HAM Turki yang memang sulit dibantah.

Status *associate member* yang disandang Turki sejak perjanjian Ankara tidak mengalami perubahan ke tahapan yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya. Bahkan dalam KTT Luksemburg tahun 1997, Uni Eropa menghapuskan Turki dari daftar kandidat anggota UE.⁷ UE memandang reformasi dan aktualisasi dibidang politik, ekonomi, militer, hukum, dan HAM Turki masih berada jauh dibawah standar prasyarat keanggotaan yang ditetapkan UE. Militer Turki dianggap belum dewasa. Penyelesaian masalah Kurdi diselatan yang merupakan masalah politik dengan menggunakan operasi militer menunjukkan

7 Murni Ratna "Turki yang Terseok Di Garbang Uni Eropa" Kompas 26 September 2004

Turki untuk bergabung kedalam Uni Eropa. Bergabungnya Turki kedalam uni Eropa lebih menjanjikan secara ekonomi maupun politik daripada harus bergabung atau tersubordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah. Dengan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa maka secara ekonomi, Turki akan diberikan hak yang sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya mengenai kebebasan lalu lintas barang dan jasa tanpa terkena bea atau lebih sering dikenal dengan sistem *Free Trade Area*. Sedangkan secara politik, keuntungan Turki menjadi anggota Uni Eropa akan mengangkat citra Turki dalam percaturan politik dunia.

Diterimanya Turki dalam Uni Eropa Akan merupakan eksperimen yang penting dalam konteks hubungan Islam-Kristen. Uni Eropa, sebuah klub Kristen “yang menempati benua Kristen” akan punya satu-satunya anggota Muslim malah akan menjadi anggota yang berpenduduk terbesar. Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, melengkapi keanggotaanya dalam NATO, diharapkan bisa menjadi semacam jembatan bagi kerjasama Kristen dan Islam yang lebih luas.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan: Bagaimana upaya Turki di ~~bidang politik, ekonomi, hukum, Hak~~

~~Asasi Manusia (HAM) dan diplomasi untuk meningkatkan status keanggotaan~~

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori-teori yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih oleh penulis. Adapun kerangka dasar pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Integrasi

Integrasi menurut model fungsional adalah suatu proses uji coba terus-menerus, berdasarkan satu keberhasilan ke keberhasilan berikutnya.¹⁰ Model ini menolak konsolidasi konstitusional secara cepat. Ia lebih mengutamakan integrasi sektor per sektor. Aliran fungsionalis berpendapat bahwa diantara beberapa masyarakat yang paling serasi sekalipun, tidak dapat mengintegrasikan semua fungsi-fungsi umum secara bersamaan.¹¹ Kolektifitas harus dilakukan persektor ekonomi, politik, atau keamanan. Kemajuan bertahap dan paralel di sejumlah sektor tersebut akan menyatu ke dalam sebuah integrasi antar sektoral secara keseluruhan. Tanpa penyatuan ini, integrasi akan terbatas dan terisolasi, serta tidak memiliki pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Integrasi adalah proses yang disadari. Oleh sebab itu setiap negara dan pemerintahan yang terlibat pasti memiliki tujuan yang jelas. Adapun beberapa

¹⁰ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional*. Hal. 429

¹¹ salah satu pendukung fungsionalisme yang paling berpengaruh adalah David Mitrany. Lihat karangannya, *A. Working Peace System* (Chicago : Quadrangle, 1946), yang pertama kali

motivasi yang menjadi tujuan utama dalam proses integrasi yaitu;¹² **Potensi Ekonomi**, adanya beberapa perekonomian raksasa tidak memungkinkan negara-negara kecil untuk bersaing. Baik negara berkembang maupun negara industri melakukan integrasi karena ingin memiliki daya saing yang lebih baik. **Potensi Politik**, negara-negara kecil dan tidak memiliki kekuasaan politik, hampir selalu tersisih dalam sistem internasional. Mereka selalu merasa terabaikan, atau menjadi korban negara *super power*. Sebagian diantara mereka berpaling ke integrasi sebagai cara menghidupkan kembali multipolaritas yang akan memungkinkan diplomasi mereka lebih berperan. **Resolusi Konflik**, dorongan lain kearah integrasi adalah keinginan untuk meredam setiap potensi konflik antarnegara yang saling bertetangga. Pengintegrasian sektor-sektor interaksi yang vital akan menumbuhkan saling ketergantungan sehingga mematikan bibit-bibit konflik yang ada.

Disamping tujuan yang memotivasi terjadinya integrasi, terdapat beberapa kondisi yang menjadi pendorong terjadinya integrasi,¹³ yaitu; **Asimilasi sosial**, dimana prakondisi integrasi regional yang terpenting adalah kondisi sosial, asimilasi sosial adalah salah satu prakondisi integrasi. **Kesamaan Nilai**, yaitu kesamaan nilai terutama diantara kaum elit. **Keuntungan bersama**, setiap negara bersedia masuk kedalam suatu proses yang secara fundamental mengubah hak istimewa nasionalnya bila hal itu memang menjanjikan keuntungan. **Kedekatan hubungan di masa lampau**, yaitu kesamaan pengalaman yakni sejarah tingkat kedekatan hubungan sesama damai suatu bangsa tidak akan berintegrasi dengan

bangsa lain yang asing baginya. **Pentingnya integrasi itu sendiri**, yakni manfaat dari integrasi itu sendiri. Tanpa kedekatan kepentingan, proses integrasi tidak akan berlangsung, akan tetapi bila suatu negara merasakan pentingnya aktivitas di negara lain maka dorongan ke arah integrasi akan tumbuh. **Biaya relatif yang rendah**, yakni jaminan bahwa keuntungan integrasi lebih banyak daripada biayanya, baik ekonomi, sosial maupun nasionalistik (kepentingan negara/pemerintah).¹⁴ **Pengaruh-pengaruh eksternal**, ada dua macam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses integrasi, yaitu; pertama, peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi proses integrasi, yaitu; pertama, peristiwa eksternal yang menyangkut kepentingan salah satu negara peserta integrasi. Peristiwa-peristiwa seperti ini bisa mengganggu partisipasi negara tersebut atau sebaliknya, bisa pula mendorong negara itu lebih berpaling ke kawasannya sendiri. Kedua, peristiwa eksternal tidak berpusat pada negara anggota, namun juga mampu mempengaruhi proses integrasi. Kebijakan luar negeri (bahkan kebijakan domestik) suatu negara dapat mempengaruhi satu atau lebih negara peserta integrasi. Pengaruh tersebut bisa bersifat integratif atau disintegratif.

Upaya integrasi Turki ke dalam Uni Eropa (UE) dilakukan sektor per sektor. Walaupun sampai saat ini Turki belum diterima sebagai anggota penuh UE, kerjasama antara Turki dengan beberapa negara kunci anggota UE sudah dilakukan dalam beberapa sektor yang esensial. Dibidang pertahanan keamanan, Turki telah bergabung dalam NATO sejak tahun 1951. Dibidang ekonomi, Turki merupakan anggota OECD sejak tahun 1948 dan dibidang politik Turki tercatat

¹⁴ Untuk suatu pengkajian yang sistematis mengenai biaya dan keuntungan supranasional, didalam atau di luar skala regional, lihat Todd Sandler dan Jon Cauley, "The Design of

sebagai anggota *Council of Europe* sejak tahun 1945. Diterimanya Turki dalam aliansi-aliansi strategis yang dibentuk oleh negara Barat tersebut memunculkan *Confidence* bagi Turki walaupun harus menempuh proses yang panjang, namun pada akhirnya Turki akan diterima dalam Uni Eropa yang menjadi tujuan utama setiap program pemerintahan Turki sejak ditandatanganinya kesepakatan Ankara.

Integrasi Turki ke dalam Uni Eropa merupakan proses yang disadari dimana pemerintah Turki memiliki motivasi yang menjadi tujuan utama dalam proses integrasi. Turki memandang dengan terintegrasinya Turki kedalam Uni Eropa maka secara ekonomi akan membuka peluang datangnya investasi asing terutama dari negara-negara Eropa Barat dalam skala yang besar sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi dan mampu menekan laju inflasi Turki. Sejak berdirinya Republik Turki, diletakkan dasar politik luar negeri Turki yaitu melihat ke negara-negara Barat. Dasar strategi orientasi kebijakan politik luar negeri Turki inilah yang menjadikan tujuan politik Turki dalam upaya integrasi ke dalam Uni Eropa sebagai wujud keinginan untuk melepaskan citra ketimurannya dengan bergabung dalam organisasi-organisasi negara Barat terutama Uni Eropa. Kepentingan integrasi Turki dalam Uni Eropa sendiri merupakan wujud upaya Turki untuk memperoleh pengakuan Dunia Internasional bahwa Turki merupakan negara Barat yang modern. Di sisi lain, letak posisi geografis Turki yang berdekatan dengan kawasan yang labil yaitu Timur Tengah dan wilayah Balkan memotivasi upaya integrasi Turki sebagai bentuk upaya resolusi konflik terhadap ekses-ekses yang mungkin muncul dari negara-negara tetangga Turki yang berkecamuk. Uni Eropa merupakan organisasi negara-negara yang mempunyai

pengaruh kuat di wilayah tersebut. Kuatnya pengaruh UE di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan wilayah Balkan, nantinya jika Turki menjadi anggota UE, status keanggotaan UE akan Turki jadikan sebagai elemen pelengkap keanggotaannya di NATO untuk memantapkan pengaruh Turki di kawasan tersebut.

2. Diplomasi

.Definisi diplomasi dalam Oxford English Dictionary menyebutkan:

*"The management of international relations by negotiation." "The method by which these relations are adjusted and managed."*¹⁵

Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan diplomasi adalah *"The application of intelligence and tact to conduct of official relations between the governments of independent states."*¹⁶ (penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat).

Pengertian diplomasi hampir sama dengan politik luar negeri, politik luar negeri menetapkan tujuan dan sasaran, sementara diplomasi mencakup sarana dan mekanisme untuk mencapai sasaran dan tujuan dari politik luar negeri di luar batas wilayah yurisdiksi. Diplomasi merupakan instrumen penting dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam banyak hal diplomasi yang erat kaitannya dengan hubungan antar

¹⁵ Oxford English Dictionary, 1967, 1:1162

negara memberikan suatu peranan yang besar dalam pemeliharaan perdamaian dengan mengedepankan seni negosiasi, pentingnya diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional sangat mengikat dalam hubungan internasional, seperti yang dinyatakan oleh Morgenthau yaitu suatu prakondisi bagi penciptaan dunia yang damai adalah berkembangnya konsesus internasional baru yang memungkinkan diplomasi mendukung "*peace through accommodation*" (damai melalui penyesuaian)¹⁷. Kissinger juga menunjukkan bahwa diplomasi berperan penting dalam penyesuaian perbedaan-perbedaan antara bangsa-bangsa. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu *Acquisition* (perolehan), *Preservation* (pemeliharaan), *Augmentation* (penambahan), dan *Proper Distribution* (pembagian yang adil).¹⁸

Agar diplomasi dapat berjalan dengan baik, diplomasi harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu: (1) diplomasi harus menetapkan tujuan-tujuannya berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya. (2) diplomasi harus menilai tujuan-tujuan negara lain. (3) Diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuannya. (4) Diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuannya.¹⁹ Dalam pelaksanaan diplomasi sarana yang sangat menentukan diantaranya adalah Bujukan (*persuasion*), Kerja sama (*Compromise*), dan Ancaman kekerasan (*Threat of force*). Ancaman kekerasan

¹⁷ S.L Roy, *Diplomacy*, Diterjemahkan oleh Harwanto, Mirsawati, Jakarta, 1995, hal. 23.

¹⁸ *Ibid*, hal. 6.

¹⁹ Lihat Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred Knopf, 1973 (5th edition).

atau perang adalah tindakan terakhir dari diplomasi bila diplomasi gagal meraihnya dengan jalan damai.

Permasalahan dalam wilayah domestik Turki pada perkembangannya selalu mengalami pasang-surut. Sejak tahun 1994 Turki mengalami krisis dibidang ekonomi. Krisis ekonomi Turki ditandai dengan depresiasi mata uang lira dan tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi yang terjadi di Turki lebih bersifat *import-pushed inflation* atau inflasi yang disebabkan oleh membanjirnya barang impor yang dinilai dengan dollar Amerika serikat sementara nilai tukar lira terhadap dolar terus berfluktuasi dan cenderung mengalami depresiasi. Nilai tukar lira terhadap dollar AS pada tahun 1999 tercatat sebesar 1,1 juta lira untuk 1 US\$ dan mencapai titik terendah pada tahun 2001 ketika pengkonversian 1 US\$ ke lira Turki mencapai angka TL 1.662.511. Keadaan tersebut diperparah dengan terjadinya gempa bumi dahsyat pada tahun 1999 yang menghancurkan sebagian sarana dan prasarana industri manufaktur dalam negeri turki yang membuat pertumbuhan ekonomi Turki mengalami kontraksi sebesar 6,4%.

Disamping krisis dibidang ekonomi, Turki juga mengalami krisis politik pada tahun 2002. Krisis tersebut ditandai dengan mundurnya ratusan pejabat pemerintahan Turki dari jabatannya yang dimotori oleh menteri luar negeri Ismail Cem dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam tubuh pemerintahan (mitra koalisi) terhadap isu-isu krusial maupun tekanan ekonomi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Turki mengalami berbagai aksi teror dimana terjadi beberapa peristiwa peledakan fasilitas-fasilitas publik. Kondisi Turki secara

runtutan peristiwa diatas menempatkan Turki sebagai negara yang tidak populer untuk dibicarakan dalam proses perluasan Uni Eropa. Hal tersebut menuntut pemerintah Turki melakukan upaya diplomasi untuk memulihkan citra Turki dimata masyarakat internasional. Pemerintah Turki berusaha membina hubungan yang lebih baik khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan dan prioritas utama saat ini lebih ditekankan hubungan dengan negara-negara Eropa. Secara obyektif upaya proses peningkatan status keanggotaan Turki pada Uni Eropa merupakan tujuan utama dalam kebijakan luar negeri Turki. Melalui jalur diplomasi pemerintah Turki berjanji akan segera memenuhi ketentuan yang menjadi prasyarat keanggotaan UE sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memperoleh jadwal atau tanggal penentuan peningkatan status.

Diluar isyu domestik, konflik yang mewarnai kemelut di kawasan menempatkan posisi Turki sangat "vulnerable" terhadap ekses-ekses yang diakibatkan oleh konflik-konflik tersebut. Hal tersebut menyebabkan Turki sangat berhati-hati dalam menentukan sikapnya menghadapi perkembangan di wilayah tersebut. Dalam menyikapi isyu Siprus dimana pengakuan Turki atas Siprus-Yunani menjadi prasyarat baru keanggotaan Uni Eropa. Turki melalui Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan berusaha melakukan perundingan dengan para pemimpin lima besar Uni Eropa yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Yunani dan Belanda untuk menerobos kebuntuan dalam persoalan Siprus. Disamping itu, Turki menempuh jalur diplomasi dalam usaha menjaga hubungannya dengan negara-negara di kawasannya demi mencegah terjadinya konflik dengan negara-negara tetangganya di Asia Tengah tentang keberadaan pangkalan dan instalasi

militer AS dan NATO diwilayah Turki. Turki secara gigih berpegang pada prinsip-prinsip bahwa penggunaan pangkalan dan instalasi militer Amerika Serikat dan NATO hanya akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan pertahanan NATO maupun implementasi dari perjanjian-perjanjian internasional atau resolusi-resolusi PBB. Terlepas dari identitasnya sebagai anggota NATO dan sekutu terdekat negara-negara Barat, jalur diplomasi yang Turki tempuh lebih dedikasikan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia Tengah mengingat adanya ikatan historis dan kultural yang kuat diantara mereka.

F. Hipotesa

Dari latar belakang masalah yang dihubungkan dengan kerangka teori yang dipakai sebagai acuannya, maka hipotesa yang dapat dikemukakan ialah:

“Turki melakukan reformasi dan aktualisasi dibidang politik, ekonomi, HAM dan hukum agar sesuai dengan prasyarat keanggotaan Uni Eropa serta mengirimkan utusan diplomatiknya untuk melakukan perundingan penetapan jadwal keanggotaan Turki dalam Uni Eropa”.

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Untuk mempermudah dan membatasi pembahasan dalam skripsi ini, penulis memberi batasan waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2004. Batasan waktu dari tahun 1999-2004 adalah berkaitan dengan perkembangan status Turki menjadi kandidat potensial dalam

KTT UE di Helsinki tahun 1999 dimana sebelumnya status Turki masih berada pada level *associate member*. Batas akhir penelitian yaitu tahun 2004 berkaitan dengan perluasan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004 yang tidak memasukkan Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa. Pembatasan ini dimaksudkan agar disamping penulis dapat tetap terfokus, juga membantu mempermudah dalam penelitian dan pengumpulan data.

Namun demikian, masalah-masalah diluar pembatasan atau jangkauan waktu yang disebutkan diatas, tidak tertutup kemungkinannya untuk dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, baik sebagai latar belakang ataupun sebagai faktor pendukung, sepanjang hal-hal itu masih ada relevansinya dengan permasalahannya yang dibahas.

H. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literature, majalah, jurnal, tabloid, *surfing* dan *browsing* internet serta dari sumber-sumber lain yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

Bab II. Proses Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa Sebelum Tahun 1999.

Bab ini berisi penjelasan tentang perkembangan upaya peningkatan status Turki sebagai *associate member* menjadi anggota penuh uni Eropa periode tahun 1963 sampai dengan tahun 1999 yang berakhir dengan kegagalan.

Bab III. Status Turki Sebagai Kandidat Potensial.

Bab ini memberikan penjelasan tentang proses Turki mendapatkan status kandidat potensial serta bagaimana reaksi dalam negeri dan luar negeri (negara-negara anggota UE) terhadap status keanggotaan Turki dalam Uni Eropa.

Bab IV. Upaya Turki Memperoleh Keanggotaan Uni Eropa.

Bab ini memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Turki untuk meningkatkan status menjadi anggota penuh Uni Eropa.

Bab V. Penutup.

Merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penulisan ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.